



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Penerapan *Dynamic Governance* dalam Pembangunan Berkelanjutan Kota Pasca Tambang di Kota Sawahlunto

Gennta Rahmad Putra¹, Aidinil Zetra², Tengku Rika Valentina³

¹Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, genta.rahmad99@gmail.com

²Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, aidinil@soc.unand.ac.id

³Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, tengkurika@soc.unand.ac.id

Corresponding Author: genta.rahmad99@gmail.com

Abstract: *Since the Dutch colonial era until now, the city of Sawahlunto has transformed from a mining city to a mining tourism city. The study focuses on policy transformation using the concept of dynamic governance. The purpose of the study is to see policy transformation as part of the implementation of dynamic governance in the city of Sawahlunto. The approach used is qualitative with a case study method. The findings of this study are that the implementation of dynamic governance has been implemented in the city of Sawahlunto. Regional Regulation Number 2 of 2001 was the beginning of policy transformation in the city of Sawahlunto. Sawahlunto as a cultural mining tourism city in 2020 is the key to policy execution. The direction of sustainable development of the city of Sawahlunto is sustainable mining tourism. Applying elements in dynamic governance, namely thinking ahead, thinking again, and thinking across as a guide. On the thinking ahead side, it refers to the policy execution of the Vision of the City of Sawahlunto as a cultural mining tourism city. Thinking again refers to innovation in developing city tourism destinations. Thinking across refers to the learning process carried out to realize a cultural mining tourism city. In addition to using elements in dynamic governance, the existence of human resources is also key. This condition is also supported by the challenges and opportunities owned by the city of Sawahlunto. Ultimately, Sawahlunto has transformed into a city based on sustainable tourism.*

Keyword: *Dynamic Governance, Policy Transformation, Sustainable Tourism, Sawahlunto*

Abstrak: Sejak zaman kolonialisme Belanda sampai saat ini kota Sawahlunto telah bertransformasi dari kota tambang menjadi kota wisata tambang. Penelitian berfokus kepada transformasi kebijakan menggunakan konsep dynamic governance. Tujuan penelitian untuk melihat transformasi kebijakan sebagai bagian penerapan dynamic governance di Kota Sawahlunto. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil temuan penelitian ini bahwa penerapan dynamic governance telah diterapkan di Kota Sawahlunto. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001 menjadi awal dari transformasi kebijakan di Kota Sawahlunto. Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya pada tahun 2020 menjadi kunci dari eksekusi kebijakan. Arah pembangunan berkelanjutan Kota Sawahlunto yaitu sustainable mining tourism. Menerapkan elemen dalam dynamic governance yaitu

thinking ahead, thinking again, dan thinking across sebagai panduan. Pada sisi thinking ahead merujuk kepada eksekusi kebijakan dari Visi Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya. Thinking again merujuk kepada inovasi mengembangkan destinasi wisata kota. Thinking across merujuk kepada proses belajar yang dilakukan untuk mewujudkan kota wisata tambang yang berbudaya. Selain menggunakan elemen dalam dynamic governance, keberadaan sumber daya manusia juga menjadi kunci. Kondisi itu juga didukung dengan tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto. Pada akhirnya Sawahlunto sudah bertransformasi menjadi kota berbasis pariwisata berkelanjutan.

Kata Kunci: Dynamic Governance, Transformasi Kebijakan, Pariwisata Berkelanjutan, Sawahlunto

PENDAHULUAN

Di tengah erubahan dunia yang penuh gejolak dan tidak dapat diprediksi menimbulkan tuntutan untuk menerapkan pemerintahan yang dinamis. Penerapan pemerintahan yang dinamis berguna untuk merespons segala tantangan dan peluang di tengah perubahan dunia yang cepat. Mengingat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dihadapkan oleh kompleksitas permasalahan dunia yang semakin banyak. Konsep mengenai pemerintahan yang dinamis ini dikenal sebagai *Dynamic Governance* (Neo & Chen, 2007). Akan tetapi, penerapan *dynamic governance* menimbulkan sebuah paradoks. Di satu sisi, pada negara dengan demokrasi yang matang tentunya penerapan dari konsep ini merupakan sesuatu yang integral. Akan tetapi, di sisi lain seperti negara berkembang atau negara demokrasi baru penerapan *dynamic governance* memerlukan usaha yang keras dan kemauman pemimpin politik yang agile untuk dapat menerapkan kapabilitas tersebut (Azhar Kasim, dkk, 2015).

Dynamic governance menjelaskan bahwa institusi yang dinamis dicirikan dengan adanya ide baru, persepsi yang segar, *up-grading* yang berkelanjutan, aksi-aksi yang cepat, adaptasi yang fleksibel dan inovasi yang kreatif. Institusi yang semacam ini akan melahirkan institusi yang selalu belajar, kebijakan yang cepat dan efektif serta perubahan yang tiada akhir. Aspek utama yang dipenuhi untuk menerapkannya berpedoman kepada elemen di dalam *dynamic governance*. Terdapat tiga elemen di dalam *dynamic governance*, diantaranya: (1) *Thinking Ahead*; (2) *Thinking Again*; dan (3) *Thinking Across*. Ketiga elemen ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah *dynamic capabilities*. *Dynamic capabilities* sebagai kapasitas organisasi dalam mengubah rutinitas dan sumber daya atau kemampuan inti untuk beradaptasi pada perubahan teknologi dan lingkungan. Untuk dapat mewujudkan *dynamic capabilities* membutuhkan dua aspek utama yaitu *able people* dan *agile process* (Neo & Chen, 2007).

Dynamic governance yang merupakan *outcome* yang diharapkan, terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang adaptif (*adaptive policies*) dilaksanakan. Adaptasi atas kebijakan ini tidak dilakukan secara pasif, akan tetapi proaktif melalui berbagai inovasi, kontekstualisasi dan implementasi. Adapun yang menjadi dasar dari proses menghasilkan *dynamic governance* adalah landasan nilai budaya (*institutional culture*) yang dimiliki oleh bangsa. Nilai budaya ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku. Tiga kapabilitas dinamis, yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* akan memfasilitasi kebijakan-kebijakan yang adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) dari lembaga-lembaga pemerintah. Sehingga mereka senantiasa terus belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan (Rahmatunnisa, 2019).

Tantangan dan peluang di tengah perubahan dunia yang sangat cepat membuat pemerintah harus segera menyesuaikan kebijakan dan keputusannya agar tidak ketinggalan zaman. Perubahan yang ada bukan hanya dirasakan oleh negara maju, namun negara

berkembang seperti Indonesia juga ikut merasakan dampak perubahan tersebut. Indonesia merupakan negara besar yang saat ini memiliki 38 provinsi. Perubahan yang begitu cepat sudah mulai dirasakan sampai ke daerah-daerah di Indonesia. Mengingat luas daerah yang begitu besar sudah menjadi tuntutan bagi pemerintah untuk menghadirkan pemerintahan yang dinamis dan adaptif. Hal ini mengarah kepada kebijakan yang adaptif (*adaptive policy*).

Terdapat beberapa temuan mengenai penerapan *dynamic governance* di beberapa daerah di Indonesia. Keberadaan daerah seperti Kota Surabaya, Kota Tarakan, dan Kabupaten Jember menjadi bukti yang dapat dicontoh dalam menerapkan konsep *dynamic governance*. Melalui perubahan dalam pelayanan publik, berbagai transformasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan kebijakan-kebijakan yang adaptif terbukti dapat memberikan insentif positif bagi daerahnya masing-masing (Azhar Kasim, dkk, 2015).

Menindaklanjuti berbagai contoh kasus dari beberapa daerah di Indonesia di atas, terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai *dynamic governance*. Beberapa penelitian terdahulu tidak banyak mengkaji mengenai transformasi kebijakan suatu daerah untuk menetapkan keberlanjutan pembangunan. Penelitian terdahulu lebih banyak melihat kepada aspek pelayanan publik yang dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip di dalam *dynamic governance*, seperti penelitian Alifatu Lela Mazidah, dkk (2019) dengan judul “Analisis *Dynamic Governance* Para Program Pelayanan Layah Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung”. Penelitian oleh Khairul Ikhsan, dkk (2020) yang berjudul “Implementasi *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Batam” lebih menekankan implementasi *dynamic governance* yang dihubungkan dengan penyelenggaraan sebuah mal pelayanan publik. Penelitian Amalia Ilmia Sari dan Zaili Rusli (2023) yang berjudul “Tata kelola Pemerintahan Dinamis (*Dynamic Governance*) dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru” lebih menekankan juga pada penerapan dari *dynamic governance* dalam sebuah pelayanan publik pada instansi di daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Komang Jaka Ferdian, dkk (2021) dengan judul “Birokrasi, Disrupsi, dan Anak Muda: Mendorong Birokrat Muda menciptakan *Dynamic Governance*” penelitian ini menekankan kepada aspek inovasi dalam *dynamic governance*. Keberadaan anak muda dalam suatu pemerintahan telah memberikan semacam perubahan bagi birokrasi dengan menerapkan prinsip di dalam *dynamic governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Fipin Indera Yani, dkk (2023) yang berjudul “Kontekstualisasi Reformasi Birokrasi Aspek Kultural Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara: Perspektif *Dynamic Governance*” menekankan kepada pelaksanaan reformasi birokrasi daerah menggunakan perspektif *dynamic governance*. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Martoyo dan Nahot Tua Parlindungan Sihalo, (2021) yang berjudul “Elemen Sukses Penerapan *Dynamic Governance* di Provinsi Jawa Barat” menekankan kepada beberapa elemen dalam pemerintahan provinsi yang sebagai bentuk penerapan dari *dynamic governance*.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas lebih banyak menekankan kepada aspek pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Akan tetapi, penelitian yang berfokus kepada transformasi kebijakan suatu pemerintahan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan jarang mendapat perhatian. Fenomena ini menarik untuk dilihat lebih jauh mengenai perubahan kebijakan yang bersumber dari perubahan lingkungan dan tuntutan zaman. Ketika terjadi perubahan secara masif di suatu daerah dan membuat pemerintah daerah untuk memikirkan ulang mengenai arah pembangunan (Neo & Chen, 2007).

Sehubungan dengan itu, Neo dan Chen, (2007) mengatakan bahwa *dynamic governance* melibatkan pilihan mengenai peraturan, kebijakan, institusi, dan struktur yang dihasilkan secara kolektif memberikan insentif dan hambatan sosio-ekonomi untuk berbagai aktivitas. Tata kelola menjadi dinamis ketika pilihan kebijakan sebelumnya dapat disesuaikan dengan perkembangan saat ini dalam lingkungan yang tidak menentu dan cepat berubah. Sehingga kebijakan dan lembaga tetap relevan dan efektif dalam mencapai hasil jangka panjang yang

diinginkan masyarakat. Hal ini lebih dari sekedar membuat perubahan satu kali atau pulih dari kemunduran. Ini adalah tentang perubahan berkelanjutan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan jangka panjang.

Penelitian ini lahir dari fenomena yang sering dijumpai oleh peneliti ketika melihat perubahan lingkungan dan sumber daya alam suatu daerah berubah drastis. Sehingga yang sebelumnya daerah tersebut memanfaatkan hasil sumber daya alam berupa hasil pertambangan, berubah menjadi pemanfaatan lahan bekas tambang menjadi pengembangan objek kepariwisataan berkelanjutan atau *sustainable mining tourism* (Cole, 2004). Tentunya keberlanjutan pembangunan yang ada di daerah ini berasal dari transformasi sebuah kebijakan. Adapun kelebihan dari penelitian ini peneliti mencoba melihat kepada sudut pandang yang baru mengenai transformasi kebijakan suatu daerah dalam menentukan keberlanjutan pembangunan yang ada di Kota Sawahlunto (Delmira Syafrini et al, 2021). Kota Sawahlunto terkenal dengan kota bersejarah yang berkembang dari komoditas pertambangan batu bara. Sekarang, Kota Sawahlunto telah bertransformasi dari kota tambang menjadi kota wisata tambang. Mengedepankan kepariwisataan berkelanjutan dan mengkombinasikan dengan kebudayaan yang dimiliki (Andi Asoka, dkk, 2016).

Kota ini bertransformasi ketika dihentikannya proses operasional penambangan batu bara oleh PT. Bukit Asam Tbk. Sejak saat itu, pada tahun 1999 Sawahlunto menghadapi resesi ekonomi yang sangat mengguncangkan. Sehingga membuat pemerintah daerah untuk memikirkan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui proses panjang dan musyawarah dengan seluruh *stakeholders* kota pada akhirnya membuahkan sebuah peraturan daerah. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota merupakan *prototipe* dari transformasi kebijakan dan pembangunan berkelanjutan (RPJPD Sawahlunto 2005-2025)

Peraturan daerah ini mencanangkan Kota Sawahlunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya pada tahun 2020. Setelah melalui proses panjang, sebelum tahun 2020 tepatnya pada 6 Juli 2019 Sawahlunto menjadi salah satu kota warisan dunia (*world heritage*) dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Atas dasar fenomena transformasi kebijakan Kota Sawahlunto tersebut, peneliti akan mencoba melihat menggunakan konsep *dynamic governance*. Peneliti akan mengkaji secara komprehensif dan mendalam mengenai transformasi kebijakan sebagai wujud penerapan *dynamic governance* di Kota Sawahlunto.

Argumen dasar peneliti menggunakan konsep *dynamic governance* merupakan tinjauan lebih lanjut mengenai konsep tersebut. Berkaca kepada penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan sebuah kebaruan dalam penelitian ilmiah dari *dynamic governance*. Hasil akhir dari *dynamic governance* bukan hanya berupa pelayanan dalam sektor publik, melainkan juga menghadirkan transformasi kebijakan. Untuk uraian dan kombinasi yang lebih spesifik peneliti juga melihat menggunakan perspektif kepariwisataan berkelanjutan yang ada di Kota Sawahlunto. Sehingga hasil yang didapatkan selain melihat lebih lanjut konsep *dynamic governance* dalam hal ini aspek transformasi kebijakan. Tetapi juga dimensi di dalam kepariwisataan berkelanjutan kota pasca tambang yang ada di Kota Sawahlunto. Tujuan dari penelitian ini menganalisis dan menjelaskan secara komprehensif penerapan *dynamic governance* dalam pembangunan berkelanjutan kota pasca tambang di Kota Sawahlunto.

METODE

Pendekatan dan desain penelitian merupakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Artinya, penelitian kualitatif lebih menekankan pada

pengamatan fenomena dan meneliti substansi dari fenomena tersebut. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai proses penelitian yang membangun gambaran yang kompleks dan holistik tentang fenomena tertentu dengan menggunakan *setting* natural. Tujuan dari riset kualitatif adalah memahami isu sosial dari banyak perspektif agar mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kejadian, orang atau kelompok tertentu (Jencik, 2013)

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian Studi Kasus yang merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “*how*” atau “*why*”, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka, peneliti tidak akan mendapatkan informasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian sehingga, diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai. Menurut Robert K. Yin pengumpulan data studi kasus berbentuk dokumentasi, rekaman, arsip, wawancara, observasi dan perangkat fisik (Robert K. Yin, 2002)

Penggunaan metode studi kasus dalam penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai penerapan *dynamic governance* dalam pembangunan berkelanjutan kota pasca tambang di Kota Sawahlunto, dengan menguji fenomena kasus penerapan transformasi kebijakan pasca tambang di Kota Sawahlunto sampai menjadi warisan dunia UNESCO, dan selanjutnya dijabarkan dengan menggunakan teori *dynamic governance* Neo & Chen (2007) mengenai tata kelola pemerintahan yang dinamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengantar

Kota Sawahlunto merupakan kota yang tumbuh dan berkembang karena pertambangan batu bara (GB Suprayoga, 2018). Sejak awal, kota ini dibangun untuk mendukung kegiatan pertambangan batu bara sejak zaman kolonial Belanda. Kota Sawahlunto direncanakan dengan sangat hati-hati dan terpola mengikuti aspirasi pemerintah kolonial saat itu. Perumahan pegawai tinggi pertambangan ditempatkan dalam suatu zona dan kawasan tertentu berdekatan dengan fasilitas perdagangan, sementara pemukiman buruh tambang diletakkan jauh di pinggiran pusat kota. Zona jasa dan komersial ditempatkan di pusat kota, terutama untuk melayani kebutuhan dan gaya hidup pejabat kolonial saat itu. Sampai sekarang, pola-pola tersebut masih dipertahankan sebagai bagian pelestarian warisan kota. Pada pertengahan abad ke-19, Sawahlunto hanyalah sebuah desa kecil dan terpencil yang berlokasi ditengah-tengah hutan belantara, dengan jumlah penduduk sekitar 500 orang. Sebagian besar penduduknya bertanam padi dan berladang di tanah dan lahan yang sebagian besar permukaan tanahnya tidak cocok untuk lahan pertanian sehingga Sawahlunto dianggap sebagai daerah tidak potensial.

Setelah ditemukannya Batu bara di Sawahlunto oleh seorang geolog kolonial Belanda bernama Ir. W.H.De Greve pada tahun 1867, maka Sawahlunto menjadi pusat perhatian Belanda kala itu. Pada tanggal 1 Desember 1888 ditetapkan keputusan tentang batas-batas ibukota *Afdealing* yang ada di Sumatera Barat. Oleh karena itu pada tanggal 1 Desember 1888 dapat dikatakan bahwa Sawahlunto mulai diakui keberadaannya dalam administrasi pemerintahan Hindia Belanda sebagai bagian dari wilayah *Afdealing* Tanah Datar pada masa itu. Batubara mengantarkan Sawahlunto sebagai catatan penting pemerintah Hindia Belanda pembukaan tambang batu bara Sawahlunto tahun 1891 merupakan aset terpenting bagi pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini disebabkan oleh

tingginya permintaan dunia akan batu bara sebagai sumber energi di abad penemuan mesin uap di Eropa Barat. Mengingat cadangan batu bara yang diperkirakan mencapai angka 205 juta ton. Usaha penambangan batubara ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1920-1921, pada waktu itu jumlah pekerja mencapai ribuan orang, selain itu ada hampir seratus orang Belanda atau Indo yang menjadi pimpinan perusahaan, ahli, dan staf kunci lainnya.

Berdasarkan *Stadsblaad Van Nederlansch Indie* pada tahun 1918, penyelenggaraan kota dilakukan oleh *Stadesgemeenteraad* (DPRD) dan *Burgemeester* (Walikota). Setelah satu abad lebih lamanya batu bara sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu kian menipis. Berdasarkan kondisi tersebut di atas pemerintah kota bersama *stakeholders* kota terus mencari alternatif lain sehingga kota Sawahlunto tidak menjadi kota mati. Pemerintah beserta elemen masyarakat kota Sawahlunto telah merancang strategi lain yaitu dengan menjadikan kota Sawahlunto sebagai kota wisata dengan menonjolkan dua potensi wisata yang menjadi kekuatannya, wisata tambang dan wisata sejarah kota lama. Pada saat ini kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multietnis, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Kota yang terkenal dengan ragam kebudayaan dan suku, yang memperingati ulang tahun setiap tanggal 1 Desember banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cadar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi “Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya”. Selain itu wisata tambang dan peninggalan kebudayaan yang dikenal sebagai Batubara Ombilin Sawahlunto telah secara resmi ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia.

Kota Tua Tambang Batubara Sawahlunto terdaftar dalam daftar tentatif WHS UNESCO pada 30 Januari 2015, dalam kategori kekayaan budaya. Kota ini dinominasikan untuk menunjukkan inovasi teknologi pertambangan batu bara, prestasi pendidikan, dan pertukaran budaya. Pemerintah pusat Indonesia memimpin upaya ini, sementara bantuan teknis diberikan oleh Komite Ilmiah Internasional ICOMOS, para anggotanya, dan para ahli independen. Tim evaluasi teknis ICOMOS mengunjungi properti tersebut pada tanggal 3–7 September 2018. Pada tanggal 13 Maret 2019, tim tersebut menerbitkan laporan evaluasi yang menyetujui nominasi untuk diserahkan ke rapat komite WHS UNESCO pada bulan Juli 2019.

Sawahlunto merupakan sebuah kota yang bertransformasi dari kota tambang ke kota wisata. Kota wisata dalam konteks ini memanfaatkan peninggalan pertambangan oleh Belanda dan memadukannya dengan kebudayaan yang ada. Setelah penambangan batu bara dihentikan, kota ini sempat mati suri, karena tidak ada lagi andalan yang bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah. Namun dalam perkembangannya, Sawahlunto mulai menggeliat. Bangunan tua peninggalan Belanda dan bekas tambang batu bara, kini dikembangkan menjadi museum dan gedung kebudayaan, sebagai destinasi wisata sejarah eksotik. Lebih dari 100 objek cagar budaya masih bertahan di tengah sapuan zaman. Lokomotif uap, terowongan kereta api, hingga lubang tambang yang masih tersisa sebagai wiyata berbilang masa. Salah satu yang terkenal adalah peninggalan tambang batu bara Ombilin. Pada tahun 2019 lalu, jejak fisik aktivitas penambangan batu bara ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Inilah warisan budaya kelima di Indonesia, dan pertama di Sumatera, yang diakui dunia. Pengakuan itu dicetuskan dalam sidang ke-43 Komite Warisan Dunia UNESCO PBB di Baku, Azerbaijan pada Sabtu, 6 Juli 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, adalah rencana pelaksanaan tahap keempat (2018-2023) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, di mana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto adalah “Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya”. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut,

RPJPD Kota Sawahlunto telah menetapkan 4 misi utama pembangunan daerah jangka Panjang, meliputi : 1) Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat; 2) Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum; 3) Mengembangkan objek wisata tambang; 4) Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata. Visi dan Misi kepala daerah terpilih pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah : “Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera” (RJPMD 2018-2023).

Berdasarkan RPJMD kota Sawahlunto periode 2018-2023 melihat kepada aspek permasalahan dan isu strategis daerah terutama pada sektor pariwisata masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi keuangan daerah. Masih rendahnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB serta terhadap PAD. Permasalahan dalam hal ini belum optimalnya pengelolaan pariwisata di Kota Sawahlunto sehingga kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto belum memberikan *multiplier* efek yang besar terhadap ekonomi daerah. Kunjungan ke Objek wisata tidak dibarengi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, baik untuk berbelanja maupun untuk menginap di Kota Sawahlunto. Kunjungan ke Kota Sawahlunto masih sebatas kunjungan ke Objek Wisata, belum mengharuskan pengunjung untuk menginap di Kota Sawahlunto. Potensi ini sebetulnya terjawab jika pengelolaan pariwisata di Kota Sawahlunto mampu mengedepankan potensi wisata tambang. Singkatnya, permasalahan ini adalah belum terintegrasikannya konsep wisata tambang dengan wisata modern di Kota Sawahlunto. Potensi wisata tambang dengan budaya sebagai rohnya belum tereksplore oleh pemerintah Kota Sawahlunto. Selain itu, dari sisi pemasaran juga Belum optimalnya pemasaran wisata baik secara integral melalui koordinasi dengan pusat maupun promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan yang masih didominasi oleh pengunjung lokal, atau setidaknya hanya daerah tetangga terdekat. Sawahlunto belum dijadikan destinasi utama karena potensi wisata yang belum diketahui oleh konsumen. Selain itu, Terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses menuju beberapa objek wisata juga masih menjadi masalah dalam pengelolaan pariwisata. Peningkatan SDM Pelaku pariwisata juga masih perlu ditingkatkan, untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini.

Berdasarkan data dari BPS sektor pariwisata Kota Sawahlunto kondisi kepariwisataan kota Sawahlunto masih tergolong rendah. Pengembangan kota wisata tambang di Sawahlunto masih terbelang belum memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pembangunan daerah. Keberadaan kota tambang yang juga merupakan warisan dunia UNESCO ini secara optimal dilakukan pengembangannya. Pada sektor pariwisata, Kota Sawahlunto memiliki 67 rumah makan/restoran, di mana yang paling banyak berada di kecamatan Silungkang. Selain itu, terdapat 53 akomodasi yang terdiri dari 2 hotel bintang, 5 hotel non bintang dan 46 akomodasi lainnya. Sebagai kota wisata, Kota Sawahlunto juga memiliki 20 tempat wisata. Pada tahun 2022, Kota Sawahlunto telah dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Tempat wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah Water Boom sebanyak 38.692 pengunjung, diikuti dengan Taman Satwa Kandi sebanyak 34.507 pengunjung, dan Puncak Cemara sebanyak 20.990 pengunjung (BPS, 2023).

2) Penerapan *Dynamic Governance* dalam Konteks Kota Sawahlunto

Tata kelola pemerintahan yang baik untuk tetap relevan dan efektif harus bersifat dinamis. Pembelajaran berkelanjutan, adaptasi dinamis dan perubahan inovatif menghasilkan efisiensi adaptif. Efektivitas suatu negara dalam menciptakan lembaga-lembaga yang produktif, stabil, adil dan diterima secara luas. Selain itu yang lebih penting fleksibel untuk diubah atau diganti ketika menghadapi guncangan agar dapat secara efektif menghadapi perubahan realitas (Neo 7 Chen, 2007). Perubahan realitas ini mau tidak mau

pemerintah dan seluruh *stakeholders* harus memikirkan dan mencari alternatif yang cocok untuk pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan Kota Sawahlunto keberlanjutan pembangunan tersebut lebih mengarah kepada kebijakan kota pasca tambang (Novendra Hidayat, 2016).

Setelah menyadari kondisi dan situasi ketika itu, pemerintah Kota Sawahlunto dan seluruh *stakeholders* mencoba mencari inovasi baru. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota dan seluruh *stakeholders* dalam mengembangkan Kota Sawahlunto adalah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2001 tersebut. Perda yang membentuk visi Kota Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya ini telah menjadi komitmen bersama seluruh *stakeholders* kota. Arah pembangunan Kota Sawahlunto yang lebih menekankan ke wisata tambang dan selaras dengan kebudayaan yang dimiliki. Visi kota wisata tambang ini akhirnya menjadi pokok pedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto 2005-2025. Selanjutnya visi tersebut yang menjadi arah dan komitmen bersama seluruh *stakeholders* dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Sawahlunto (RPJPD Sawahlunto 2005-2025).

Dikeluarkannya Perda Nomor 2 Tahun 2001 mengenai visi Kota Sawahlunto merupakan bentuk dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan *stakeholders*. Pada bab 8 Neo & Chen (2007) berbicara mengenai proses inovasi yang ditandai oleh keberadaan proses yang agile dalam membangun sistem dan struktur. Konsep mengenai inovasi tersebut tentunya bermakna luas dan penjelasan yang dijelaskan juga berdasarkan pengalaman negara Singapura dalam membangun hal tersebut. Untuk itu, dalam sebuah tata kelola pemerintahan tentunya inovasi merupakan hal yang mutlak. *Innovation in governance* merupakan proses yang mutlak dilakukan oleh seluruh pemerintahan yang ada (Sudrajad & Andhika, 2021). Mulai pemerintah dari pusat sampai kepada daerah. Tentunya inovasi akan memberikan semacam perubahan dan kerangka berpikir bagi pemerintah, terutama dalam hal sektor publik. Inilah yang seharusnya diperlukan dalam melihat konteks *dynamic governance* dalam hal inovasi. Mengingat konsep inovasi yang ditawarkan oleh *dynamic governance* merupakan pengalaman dari Singapura. Tentunya dalam hal ini juga dapat dilihat dari segi inovasi yang dilakukan oleh pemerintah lainnya. Terutama dalam mencari sebuah alternatif kebijakan atau mereformasi sektor public.

Terkait dengan inovasi di atas, dikeluarkannya Perda Nomor 2 tahun 2001 tentang visi Kota Sawahlunto ke depan merupakan sebuah bentuk inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Visi Kota Sawahlunto tahun 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya merupakan bentuk dari penerapan *dynamic governance* di Kota Sawahlunto dalam hal inovasi. Arah pembangunan dan komitmen bersama dalam melanjutkan visi ini terlihat dari keberlanjutan kepemimpinan yang ada di Kota Sawahlunto. Tentunya sebagai pemimpin tertinggi di Kota Sawahlunto, keberlanjutan kepemimpinan yang dipegang oleh Wali kota juga menjadi faktor penentu penerapan *dynamic governance* ini. Artinya bahwa *dynamic governance* bukan hanya mengenai perubahan kebijakan, namun juga dalam hal kepemimpinan politik.

Dengan komitmen dan keberlanjutan arah pembangunan kota tersebut, penerapan visi ini tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan politik (Wali kota/Wakil Wali kota) di Kota Sawahlunto. Sehingga pencapaian yang didapatkan oleh Kota Sawahlunto dalam mengimplementasikan komitmen pembangunan berkelanjutan yang sudah digariskan. Komitmen atas keberlanjutan pembangunan dengan mengimplementasikan visi kota wisata tambang yang berbudaya ini mencapai puncaknya pada tahun 2019. Pada 6 Juli 2019 di Baku, Azerbaijan Kota Sawahlunto mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai Kota Warisan Dunia (*World Heritage*) (whc.unesco.org). Oleh karena itu, terkait visi dalam Perda Nomor 2 tahun 2001 tersebut

sebagai bentuk penerapan inovasi di dalam *dynamic governance* di Kota Sawahlunto akan dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini.

Sebagai bentuk penerapan konsep *dynamic governance* di Kota Sawahlunto hal pertama yang dapat dilihat dari sisi kepemimpinan politik. Mengenai kepemimpinan politik, Kota Sawahlunto sejak reformasi sampai saat ini telah dipimpin oleh empat orang Wali kota selain penjabat antar waktu. Empat orang diantaranya adalah Drs. Subari Sukardi (1993-2003), Ir. H. Amran Nur (2003-2013), Ali Yusuf, S.Pt (2013-2018), dan Deri Asta, S.H (2018-2023). *Dynamic governance* tidak terjadi secara kebetulan, namun merupakan hasil dari niat dan ambisi kepemimpinan yang disengaja untuk menyusun interaksi sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional yang diinginkan. Hal ini mencerminkan upaya yang disengaja dari para pemimpin untuk membentuk masa depan, untuk mencoba menyusun interaksi antar manusia sebagai alternatifnya.

Dynamic governance membutuhkan keberlanjutan dalam arah pembangunan. Keberlanjutan yang dimaksud ditandai dengan adanya komitmen dari setiap kepemimpinan. Kepemimpinan yang menjaga komitmen bersama dalam hal keberlanjutan pembangunan menjadi kunci mencapai *dynamic governance*. Hal ini terlihat dari penjelasan Lelis Eprienti mengenai keberlanjutan kepemimpinan Wali kota di Kota Sawahlunto terhadap implementasi visi kota wisata tambang:

“...Jadi kalau ibu membacanya seperti ini, pak Subari Sukardi berhasil merumuskan dari sisi ide bersama masyarakat dan pak Amran Nur berhasil merealisasikannya. Itu yang ibu tangkap dan hebatnya kalau biasanya kalau ada perubahan kepemimpinan selalu buat yang baru loh. Inilah yang menurut ibu sangat-sangat, ibu kalau sama kawan-kawan banyak belajar sama pak Amran seperti itu. Bayangkan beliau alumni ITB. Ini apalah awal-awal terus sempat inilah apa ya maksudnya bapak ini apa sebetulnya. Apa sebetulnya ini dimaksudkan, tetapi pada saat itu beliau yang ibu tangkap karena ini sudah menjadi perjalanan panjang, musyawarah dengan masyarakat, sudah ada kajian-kajian kemudian di Perdakan. Kalau sudah diperdakan berarti kalau secara ini sudah amanat dari masyarakat. Itulah yang menurut ibu titik sikap pemimpin yang berkelanjutan itu yang bisa membawa keberhasilan. 2 periode pak Amran itu menurut ibu luar biasa menetapkan tahapan-tahapan itu. Beliau sangat sadar bahwa objek itu butuh waktu yang panjang. Wisata butuh waktu yang panjang. Perubahan perilaku, tidak mudah mengubah perilaku. Kalau karakter buruh dengan wisata karena lebih harus apa ya pelayanan. Memang untuk orang-orang yang kreatif itu tidak mudah. Itu kan beliau membuat kita bekerja untuk selama 2 periode. Jadi kuncinya menurut ibu memang pemimpin ya tidak langsung ketika ada transisi lalu menganggap bahwa semua dari nol lagi. Ketika dari transisi pemimpin membuat dari nol lagi semua harus di ubah tapi itu tidak. Menurut ibu tahap pemimpin di Sawahlunto itu dari periode periode sangat sangat menjaga keberlanjutan itu. Ibu melihat sendiri itu tapi kalau soal kecepatan soal ini mungkin lagi yang berbeda soal pendekatannya tapi, sangat menghargai apa yang sudah dirintis. Kita di ini di rel keberlanjutan itu perlu sangat serius”. (Wawancara dengan Lelis Eprienti Kepala Barenlitbangda Kota Sawahlunto di Kantor Barenlitbangda Kota Sawahlunto pada Rabu, 9 Oktober 2024 jam 08:12)

Kepemimpinan politik menjadi ciri khas di dalam *dynamic governance*. Factor keberadaan pemimpin yang bisa membawa institusi untuk terus berkembang dan melakukan inovasi dalam hal sektor public menjadi ciri khas Singapura. Keberadaan Lee Kwan Yew selalu dihubungkan dengan kisah sukses dari pondasui awal Singapura. Akan tetapi, model kepemimpinan yang ada di Singapura tentunya memiliki perbedaan dengan model kepemimpinan yang lain. Salah satu konsensus umum dari model kepemimpinan

adalah kepemimpinan transformasional (Harsoyo, 2022). Secara teoritis kepemimpinan transformasional telah berhasil membawa perubahan signifikan bagi instansi dan organisasi yang dipimpinnya. Sehingga dengan adanya transformasi yang dilakukan membawa berbagai inovasi ke depan untuk menjawab tantangan Connie Deng et al, 2023)

Sehubungan dengan hal di atas, komitmen yang tegas dari pemimpin dalam menentukan arah pembangunan berdasarkan asas keberlanjutan. *Dynamic governance* tidak akan tercapai jika setiap perubahan kepemimpinan politik saling bertentangan. Untuk itu kepemimpinan yang erat kaitannya dengan ini mengarah kepada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini erat kaitannya dengan Keberadaan Amran Nur sebagai wali kota Sawahlunto 2003-2013. Terkait Kota Sawahlunto, keberlanjutan arah pembangunan kota dan komitmen dari Wali kota juga di utarakan oleh Deri Asta sebagai Wali kota periode 2018-2023. Keberlanjutan pembangunan kota Sawahlunto yang lebih menekankan kepada pengembangan kota wisata tambang yang berbudaya sudah menjadi komitmen dan kesepakatan bersama.

3) Elemen *Thinking Ahead*

Thinking ahead atau berpikir ke depan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan di masa depan, memahami implikasinya terhadap tujuan sosial ekonomi yang penting dan mengidentifikasi investasi strategis. Pilihan yang diperlukan untuk memungkinkan masyarakat memanfaatkan peluang baru dan menghadapi potensi ancaman. Maksud dari *thinking ahead* adalah untuk mendapatkan pandangan ke depan akan mendorong lembaga tersebut untuk menilai risiko strategi dan kebijakan saat ini. Selain itu juga menyegarkan tujuan dan membuat konsep inisiatif kebijakan baru untuk mempersiapkan masa depan. Kerangka waktu pemikirannya adalah dari masa depan hingga saat ini, dengan perspektif luar-dalam (*outside-in*) mengenai bagaimana ketidakpastian dalam lingkungan eksternal akan mempengaruhi pencapaian hasil dan tujuan yang diinginkan (Neo & Chen, 2007)

Aspek *thinking ahead* dalam pembangunan berkelanjutan kota pasca tambang di Kota Sawahlunto terdapat pada Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota Sawahlunto. Aspek pertama dalam *thinking ahead* yaitu menjajaki dan mengantisipasi tren dan perkembangan di masa depan yang mungkin berdampak signifikan terhadap tujuan kebijakan. Visi Kota Sawahlunto tahun 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya sebagaimana dijelaskan pada pembahasan di atas sudah melalui kajian dan musyawarah seluruh *stakeholders* kota. Sebagai tindak lanjut dari implementasi dan eksekusi visi tersebut, pemerintah kota dan seluruh *stakeholders* memasukkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025. Aspek *thinking ahead* yang terdapat dalam konteks Kota Sawahlunto adalah eksekusi dari penerapan visi tersebut. Mulai dari pembuatan visi, pengembangan objek wisata baik itu wisata khusus maupun alam, dan sampai kepada penghargaan *world heritage* dari UNESCO.

4) Elemen *Thinking Again*

Elemen dalam *dynamic governance* selanjutnya adalah *thinking again* atau berpikir lagi. *Thinking again* adalah kemampuan untuk menghadapi kenyataan terkini mengenai kinerja strategi, kebijakan dan program yang ada, dan kemudian merancang ulang strategi tersebut untuk mencapai kualitas dan hasil yang lebih baik. Kerangka waktu berpikir adalah dari situasi saat ini hingga masa depan, dengan perspektif *inside-out* tentang bagaimana kinerja kebijakan dan program saat ini dibandingkan dengan maksud dan hasil yang diinginkan. Hal ini melibatkan pemanfaatan data aktual, informasi, pengukuran dan umpan balik untuk memunculkan permasalahan dan permasalahan yang menghambat kinerja yang lebih baik. Melihat lebih jauh dari kebijakan atau program tertentu untuk mencari cara meningkatkan kinerjanya (Neo & Chen, 2007).

Sehubungan dengan penjelasan aspek *thinking again* di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal yang dilakukan di Kota Sawahlunto. Mengenai aspek pertama dalam *thinking again* yaitu meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan memahami masukan masyarakat. Meninjau ulang kembali dalam hal daya saing dan daya tarik dalam objek-objek pariwisata yang ditawarkan. Penerapan aspek *thinking again* dalam konteks penerapan visi Kota Sawahlunto lebih merujuk kepada pengembangan kepariwisataan di Kota Sawahlunto. Sebagai pedoman dalam memahami kepariwisataan Kota Sawahlunto terdapat beberapa studi atau temuan menarik.

Dua artikel yang dimaksud pertama, mengenai *The attractiveness of a post-mining city as a tourist destination from the perspective of visitors: a study of Sawahlunto old coal mining town in Indonesia*. Artikel ini berbicara mengenai daya tarik dari Kota pasca tambang sebagai tujuan wisata dari sudut pandang wisatawan. Hasil kajian riset ini mengungkapkan bahwa keindahan alam, situs peninggalan pertambangan, museum, dan ciri arsitektur merupakan sumber daya yang paling menarik yang ditemukan di kota pasca tambang oleh pengunjung. Sumber daya inilah yang menjadi motivasi utama kunjungan mereka (Armis & Kanagae, 2020).

Selanjutnya artikel kedua yang berjudul *Regional competitiveness of a post-mining city in tourism: Ombilin coal mining heritage of Sawahlunto, Indonesia*. Artikel ini lebih membahas perihal daya saing dari sisi regional dalam konteks kota pasca tambang di Kota Sawahlunto. Tentunya hal ini merujuk kepada daya saing Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) setelah ditetapkan menjadi world heritage oleh UNESCO. Studi ini menemukan bahwa tiga atribut, yakni peluang olah raga dan rekreasi, belanja, dan kuliner, mempunyai dampak yang lebih tinggi yang mendorong daya saing. Karena kinerja Sawahlunto berada di bawah rata-rata, kebijakan untuk meningkatkan ketiga atribut ini sambil tetap mempertahankan pengalaman unik yang ditawarkan oleh konteks pasca tambang harus menjadi prioritas dalam perencanaan para pengambil keputusan lokal dan pengelola destinasi (Armis & Kanagae, 2021).

5) **Elemen *Thinking Across***

Dynamic governance sebagai sebuah konsep mengenai pemerintahan yang dinamis memiliki konsep yang kompleks. Pembahasan di atas mengenai elemen dalam pemerintahan yang dinamis mengembangkan ke arah bagaimana cara berpikir. Kemampuan itu terdiri dari berpikir ke depan dalam hal membaca arah masa depan, setelah itu berpikir lagi berarti meninjau ke belakang. Akan tetapi, kedua kemampuan tersebut belum cukup, ada satu lagi kemampuan berpikir yang lebih melengkapi, yaitu *thinking across* (berpikir ke samping) Azhar Kasim, dkk, 2015)

Thinking across adalah kemampuan untuk melintasi batas-batas tradisional untuk belajar dari pengalaman orang lain. Sehingga ide-ide bagus dapat diadopsi dan disesuaikan untuk memungkinkan kebijakan atau program baru dan inovatif untuk diujicobakan dan dilembagakan. Hal ini lebih dari sekedar adopsi atau peniruan aturan dan praktik yang mungkin berhasil di tempat lain. Dengan belajar dari orang lain, diperoleh wawasan yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan unik konteks budaya dan sejarah suatu negara. Berpikir menyeluruh adalah kemampuan tata kelola dinamis yang memperkenalkan ide-ide segar dan inovasi ke dalam masyarakat. Kerangka waktu dan perspektif berpikir adaptif adalah dari masa kini di luar hingga masa depan di dalam (Neo & Chen, 2007).

Praktik *thinking across* ini juga dilakukan dalam mengeksekusi visi kota wisata tambang yang berbudaya di Kota Sawahlunto. Berbagai usaha dilakukan guna mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang cocok untuk mengembangkan dan mengimplementasikan visi kota tersebut. Tempat yang dijadikan bahan percontohan

sekaligus tempat belajar adalah Malaka atau Malaysia. Studi banding ini juga dikatakan oleh Deri Asta:

“...Yang paling dekat itu kita dengan Malaka, paling dekat dan paling mirip kalau secara budaya.” (Wawancara dengan Deri Asta di Posko Pemenangan Kampanye Kampung Teleng, Selasa, 1 Oktober 2024, Jam 13:07 WIB)

Penjelasan dari Zohirin Sayuti juga memperkuat keterangan dari Deri Asta. Proses pembelajaran ke Malaysia sudah dilakukan sejak Amran Nur menjadi Wali kota. Proses belajar ini juga menimbulkan kerja sama dan pertukaran kebudayaan. Kerja sama dan pertukaran kebudayaan ini dalam hal museum. Sebagaimana penjelasan dari Zohirin Sayuti:

“...Dulu kan waktu dengan Pak Amran kan ke Malaysia Malaka, bahkan Doktor-Doktor di Universitas Malaysia itu kita bawa diskusi di sini kan termasuk dengan museum di Malaka kita bekerja sama bahkan itu di Galeri. Kita ada di Malaka dan dari Malaka ada di kita. sampai di situ kita kan harusnya itu dijalin kembali. waktu Bapak dengan Bapak dari pemimpin Bapak sudah melontarkan itu. Kita terbentur mendatangkan orang ya keburu covid kan. dulu ada tanah gigit tenaga ahli kita dulu di Malaka Bapak Irwan Darwis kan. kebun binatang juga kita pakai juga tenaga ahli.” (Wawancara dengan Zohirin Sayuti Mantan Wakil Wali kota Sawahlunto 2018-2023 di kediamannya di Santur, Sawahlunto pada Sabtu, 12 Oktober 2024, Jam 17:07 WIB)

Poin penting yang ada dalam aspek *thinking across* ini bukan hanya proses pembelajaran dari pengalaman orang lain yang dilakukan, namun proses ini juga dijadikan orang lain untuk belajar dari Kota Sawahlunto. Sejak dinobatkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia, orang-orang dari daerah lain banyak belajar dari Kota Sawahlunto. Proses belajar dan saling bertukar informasi ini dilakukan dengan tujuan mengetahui proses dari awal dan usaha-usaha serta inovasi apa saja yang dilakukan oleh Kota Sawahlunto dalam mempersiapkan diri sebagai *world heritage*.

KESIMPULAN

Pelajaran dari Kota Sawahlunto dalam komitmennya terhadap keberlangsungan kebijakan dapat dijadikan contoh. Komitmen dalam mengimplementasi visi kota telah membuahkan hasil. Sekalipun itu memerlukan perjalanan waktu yang cukup panjang. Namun, dari peristiwa tersebut dapat dipelajari bahwa suatu perubahan akan didapatkan dengan usaha yang keras dan bersifat berkelanjutan. Penobatan Kota Sawahlunto sebagai kota warisan dunia (*world heritage*) oleh UNESCO dapat dijadikan contoh dari proses tersebut.

Perjalanan Kota Sawahlunto sampai mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai *world heritage. Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS)* sebagai warisan dunia memiliki perjalanan dan usaha yang panjang. Selain itu, untuk mendapatkan predikat tersebut diperlukan kemampuan dan komitmen seluruh *stakeholders* kota dalam mengeksekusi visi yang telah ditetapkan. Dengan berkaca kepada komitmen jangka panjang, keberlanjutan kepemimpinan dan kemampuan tiga berpikir tersebut yang menjadi dasar pencapaian hari ini. Usaha ini tidak terlepas dari pembelajaran berkelanjutan untuk mencapai kebijakan yang adaptif untuk masa depan.

Terjadinya transformasi dalam kebijakan yang ditandai dengan perubahan arah pembangunan Kota Sawahlunto menjadi bukti bahwa penerapan *dynamic governance* diterapkan. Usaha sadar seluruh *stakeholders* kota untuk melanjutkan pembangunan juga menjadi faktor penentu. Selain juga keberadaan sumber daya yang ada dan diikuti oleh kondisi serta situasi dalam mengeksekusi visi kota wisata tambang. Oleh karena itu melalui pengalaman dan pengalaman panjang Kota Sawahlunto dalam mengeksekusi dan mengimplementasikan visi kota wisata tambang yang berbudaya telah melahirkan sebuah kebijakan yang transformatif dan adaptif bagi pembangunan berkelanjutan di Kota

Sawahlunto. Arah visi kota wisata tambang ini juga mengusung tema pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan keberlanjutan kepariwisataan dengan memanfaatkan segala destinasi dan peluang itu yang menjadikan kebijakan tersebut adaptif bagi keberlanjutan pembangunan kota. Namun, di dalam mengeksekusi visi tersebut juga terdapat tantangan dan peluang yang dimiliki.

REFERENSI

- Armis, Roni & Kanegae, Hidehiko (2020) The attractiveness of a post-mining city as a tourist destination from the perspective of visitors: a study of Sawahlunto old coal mining town in Indonesia. *Asia-Pacific Journal of Regional Science* 4:443–461 <https://doi.org/10.1007/s41685-019-00137-4>
- Armis, Roni & Kanegae, Hidehiko (2021) Regional competitiveness of a post-mining city in tourism: Ombilin coal mining heritage of Sawahlunto, Indonesia. *Regional Science Policy & Practice*, hal 1888-1910. DOI:10.1111/rsp3.12404
- Asoka, Andi. dkk. 2016. *Sawahlunto Dulu, Kini, dan Esok*. Padang: Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Andalas
- Cole, Danise (2004) Exploring the Sustainability of Mining Heritage Tourism, *Journal of Sustainable Tourism*, 12:6, 480-494, DOI: 10.1080/09669580408667250
- Deng, Connie. Duygu Gulseren, Carlo Isola, Kyra Grocutt & Nick Turner (2023) Transformational leadership effectiveness: an evidence-based primer, *Human Resource Development International*, 26:5, 627-641, DOI: 10.1080/13678868.2022.2135938
- Ferdian, Komang Jaka. Faedlulloh, Dodi & Ibrahim (2021) Birokrasi, Disrupsi, dan Anak Muda: Mendorong Birokrat Muda menciptakan *Dynamic Governance*. *JURNAL TRANSFORMATIVE*. 7(1) <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.01.5>
- Harsoyo, Roni. 2022. Teori Kepemimpinan Transformasional Bernard M. Bass dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* Vol. 3 No. 2 (2022), pp 247-262
- Huraerah, Abu. 2019. *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*. Bandung: Nuansa Cendekia, hal 72.
- Ikhsan, Khairul. Samin, Rumzi, Akhyary, Edy (2020) Implementasi *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Batam. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3) 385-400. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i3.3561>
- Jencik, Alicia dalam John T. Ishiyama, John T & Breuning, Marijke (2013) *Riset Kualitatif Versus Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Kasim, Azhar, dkk. 2015. *Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Martoyo dan Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan (2021) Elemen Sukses Penerapan *Dynamic Governance* di Provinsi Jawa Barat. *JURNAL PUBLIC POLICY*. 7(1) hal 41-46 <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3142>
- Mazidah, Lela. Astuti, Feni. Romdhoni, Muhamad Febi. Nur, Muhamad Ichšana. Juana, Tedi (2019) Analisis *Dynamic Governance* Para Program Pelayanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung. *Spirit Publik Volume* 14(2) Hal 154-163 <https://doi.org/10.20961/sp.v14i2.39290>
- Neo, Boon Siong & Geraldine Chen. 2007. *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing
- Nilamsari, Natalia (2014) Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*. Volume XIII No 2. Hal 177-181 <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>
- Novendra Hidayat, Novendra (2016) Implementasi Kebijakan Pasca Tambang di Kota Sawahlunto. *Society*, 3 (1) hlm 1-25
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota Sawahlunto

- Rahmatunnisa, M (2019). Dialaektika Konsep Dynamic Governance. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 2(02).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.116>
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto (2005-2025) pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah 2005-2025.
- Sari, A. I., & Rusli, Z. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i1.442>
- Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2023
- Sudrajat, A. R., & Andhika, L. R. (2021). Empirical Evidence Governance Innovation in Public Service. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 407–417. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.407-417>
- Syafrini. Delmira 2021. Transformation of a Coal Mining City into a Cultured Mining Heritage Tourism City in Sawahlunto, Indonesia: A Response to the Threat of Becoming a Ghost Town. *Tourism Planning & Development*, 1-20 DOI: 10.1080/21568316.2020.1866653
- Yani, Fipin Indera. Kusuma, Aji Ratna. Paselle, Enos (2023) Kontekstualisasi Reformasi Birokrasi Aspek Kultural Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara: Perspektif Dynamic Governance. *Jurnal Administrative Reform*, 11(2).
<http://dx.doi.org/10.30872/jar.v11i2.12895>
- Yin, Robert. K. 2002. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Persada